

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PERATURAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
(STUDI KASUS KOTA PAYAKUMBUH)



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2016**

ABSTRAK

Izin Mendirikan Bangunan tentunya sangat diperlukan khususnya di Kota Payakumbuh sebagai daerah rawan bencana alam/gempa bumi, karena itulah IMB menjadi hal yang penting hal-hal seperti lambannya birokrasi, ketidakjelasan informasi, lamanya pemrosesan perizinan diharapkan tidak lagi menjadi kendala yang dapat menjadi penghambat bagi masyarakat yang ingin mengurus IMB di Kota Payakumbuh. IMB sebagai salah satu izin pemanfaatan ruang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 selain mempunyai fungsi sebagai instrument pengendali dalam pembangunan dan penataan ruang kota/wilayah juga merupakan jaminan kepastian hukum terhadap bangunan itu sendiri. Namun demikian sebagai salah satu bentuk regulasi yang harus dipatuhi oleh masyarakat di Kota Payakumbuh, berlakunya peraturan tersebut belum dapat dipatuhi dengan sebagaimana mestinya. Sehingga wilayah yang memiliki potensi berkembang sebagai perkotaan, secara keruangan penataan bangunan memberikan kesan adanya kurang keserasian, untuk mengetahui sejauh mana tingkat peran serta masyarakat dalam peraturan IMB dalam penataan ruang wilayah di Kota Payakumbuh dapat dilihat dari pendapat atau persepsi dan sikap masyarakat. Penilaian aspek pengetahuan, aspek ketaatan dan aspek sikap atau penghayatan dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan tabulasi silang dalam variabel (intra) dan tabulasi silang antar variabel (inter). Dari penilaian tersebut dapat diketahui tingkat partisipasi masyarakat dalam tiga tingkat yaitu tinggi, sedang dan rendah, dengan demikian dapat dikatakan semakin tinggi tingkat pengetahuan, ketaatan dan sikap atau penghayatan terhadap peraturan tersebut, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya, begitu pula sebaliknya. Dari hasil penelitian melalui pengolahan data yang diperoleh sesuai metoda di atas dapat diketahui bahwa tingkat penghayatan atau sikap masyarakat terhadap peraturan IMB cukup tinggi. Dengan demikian menunjukkan bahwa dengan berlakunya peraturan izin mendirikan bangunan di Kota Payakumbuh, masyarakat mau menerima atau dapat menyetujui peraturan tersebut. Kondisi ini tentu saja merupakan suatu yang positif bagi upaya pembangunan wilayah khususnya dalam pelaksanaan tertib tata ruang. Hasil tabulasi silang untuk mengetahui hubungan antara tingkat kepatuhan dengan kondisi sosial ekonomi dan aspek fisik bangunan ditemukan bahwa tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan jenis mata pencaharian masyarakat mempunyai hubungan yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan masyarakat. Dari aspek fisik bangunan, terhadap luas bangunan dan jarak bangunan dan sempadan juga mempunyai hubungan yang signifikan. Dampak nyata dan kurang atau rendahnya tingkat kepatuhan tersebut terlihat bahwa penataan bangunan masyarakat kurang menunjukkan keserasian terhadap penataan ruang.

(Kata kunci: Peran serta masyarakat dan Izin Mendirikan Bangunan)